

**FISHERYPROGRESS.ORG**

---

**Kebijakan Hak Asasi Manusia dan Tanggung  
Jawab Sosial**

Amandemen Versi 1.0

*Tanggal Peluncuran: 1 Maret 2022*

*Tanggal Berlaku: 1 Maret 2022*

## Daftar Isi

Kata Pengantar	3
Rangkuman Perubahan-Perubahan dalam Kebijakan	5
Rincian Perubahan Kebijakan	7
Perubahan umum	7
Gambaran Umum tentang Kebijakan (Direvisi)	8
Kapan FIP harus mematuhi kebijakan ini? (Direvisi)	8
Bagaimana FisheryProgress akan menangani tuduhan-tuduhan pelanggaran hak-hak asasi manusia? (Dihilangkan)	9
Persyaratan 1.1 (Direvisi): Menunjukkan adanya satu pernyataan kebijakan publik yang menjelaskan satu komitmen terhadap hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial	10
1.1.1 Rincian persyaratan	10
1.1.2 Latar belakang pemikiran dan informasi tambahan	13
Persyaratan 1.3 (Direvisi) Melaksanakan upaya terbaik untuk membuat para nelayan sadar terhadap hak-hak mereka.	13
1.3.1 Rincian persyaratan	14
1.3.2 Latar belakang pemikiran dan informasi tambahan	15
Lampiran A (Dihilangkan)	16
Lampiran B (Direvisi) Indikator-Indikator SRA FisheryProgress yang Utama	17
Lampiran D (Direvisi) Istilah Penting dan Definisi	19

## Kata Pengantar

Pada Mei 2021, FishChoice meluncurkan [Kebijakan Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Sosial FisheryProgress](#) beserta serangkaian fitur di situs web FisheryProgress untuk menjadi wadah bagi proyek-proyek peningkatan perikanan (*fishery improvement projects/FIPs*) untuk memuat laporan tentang kinerja sosial untuk umum. Kami meluncurkan kebijakan tersebut sebagai satu titik awal sembari mengakui bahwa banyak yang akan bisa dipelajari oleh FisheryProgress dan masyarakat ketika kita mulai untuk fokus pada tanggung jawab sosial dalam FIP. Kami menekankan dalam surat pengantar tentang kebijakan baru ini bahwa pelaksanaan pada tahun pertama akan fokus untuk mengkaji baik keefektifan dan kepraktisan kebijakan dan membuat penyesuaian yang diperlukan.

Kami berterima kasih atas umpan balik dari [29 FIP](#) yang mendaftar sebagai penerap pertama serta banyak pemangku kepentingan FIP lainnya yang terus bekerja bersama kami untuk memahami dan memperbaiki kebijakan ini. Sebagai hasilnya, [pada Oktober 2021 kami mengumumkan](#) bahwa kami mempertimbangkan untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap kebijakan dan menunda pemenuhan tenggat-tenggat waktu terkait. Ada dua tantangan utama yang membuat kami mengambil keputusan ini.

Yang pertama terkait dengan persyaratan bagi FIPs untuk menandatangani Kode Etik Hak Asasi Manusia FisheryProgress (Persyaratan 1.1), yang bisa memberikan jaminan semu tentang tanggung jawab sosial FIP dan merupakan duplikasi bagi peserta FIP yang sudah menyatakan komitmen kepada masyarakat umum. Perubahan-perubahan yang diuraikan dalam amandemen ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut serta untuk meningkatkan rasa memiliki FIP terhadap tanggung jawab untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hak tenaga kerja. Tujuan kami adalah untuk meningkatkan dampak kebijakan dengan memberikan lebih banyak penekanan pada kerja-kerja yang sudah dilakukan FIP dan dengan meningkatkan fleksibilitas untuk memungkinkan FIP merancang atau memanfaatkan komitmen-komitmen yang sudah ada yang mencerminkan konteks unik mereka.

Tantangan kedua berkenaan dengan pengembangan satu pendekatan dalam menangani tuduhan-tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi penyeimbang terhadap risiko-risiko yang dihadapi FishChoice, FIP, dan pekerja dengan kenyataan bahwa kita adalah sebuah lembaga kecil dengan kapasitas dan keahlian yang terbatas untuk melaksanakan penyelidikan di lapangan. Selama beberapa bulan terakhir, FishChoice telah melakukan penelitian tambahan dan berbicara dengan berbagai pemangku kepentingan hak asasi manusia, industri dan FIP untuk menyusun satu pendekatan yang bisa diandalkan namun realistis untuk menangani tuduhan-tuduhan pelanggaran hak-hak asasi manusia berat. Dari proses ini dihasilkan kesimpulan penting bahwa melanjutkan dengan menggunakan pendekatan yang kurang matang akan bisa menimbulkan kerugian alih-alih membawa kebaikan.

Kami masih mempunyai tugas untuk menyempurnakan pendekatan dalam menangani tuduhan-tuduhan pelanggaran hak-hak asasi manusia. FishChoice akan terus berkonsultasi dengan para FIP dan para pemangku kepentingan mereka sembari melanjutkan proses ini. Kami berharap akan mendapatkan jawaban yang jelas terhadap pertanyaan ini pada Kuartal ke-4 tahun 2022, yaitu ketika kami meluncurkan revisi kecil terhadap kebijakan ini yang berisi amandemen ini serta pembelajaran-pembelajaran tambahan dari pelaksanaan di tahun pertama.

Jika anda mempunyai pertanyaan tentang amandemen ini, atau tentang perubahan-perubahan dan masa depan Kebijakan Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Sosial ini, silahkan mengirimkan email kepada kami di [contact@fisheryprogress.org](mailto:contact@fisheryprogress.org).

Salam hangat,  
Tim FisheryProgress

## Rangkuman Perubahan-Perubahan dalam Kebijakan

Tabel berikut ini (Tabel 1) berisi rangkuman perubahan-perubahan dalam amandemen ini. Semua persyaratan dan panduan lain yang diuraikan dalam kebijakan asli versi 1.0 tetap tidak berubah.

**Tabel 1. Rangkuman Perubahan dalam Kebijakan**

Bagian kebijakan	Perubahan	Deksripsi
Perubahan umum	Direvisi	Acuan pada persyaratan-persyaratan dan istilah-istilah yang direvisi dalam amandemen ini diganti dengan revisinya dalam kebijakan.
“Gambaran umum kebijakan”	Direvisi	Dua sub-bagian diubah: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jadwal penerapan berkala direvisi.</li> <li>• Informasi tentang tuduhan-tuduhan pelanggaran hak-hak asasi manusia dihilangkan.</li> </ul>
“Persyaratan 1.1 Kode Etik”	Direvisi	Persyaratan 1.1 direvisi secara keseluruhan. Sebagai ganti persyaratan bagi FIP untuk menandatangani Kode Etik (( <i>Code of Ethic</i> ) Hak Asasi Manusia FisheryProgress, persyaratan revisi mensyaratkan FIP untuk menunjukkan bahwa mereka mempunyai pernyataan kebijakan publik yang berisi komitmen untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan hak-hak tenaga kerja dan untuk memberikan penjelasan tentang pernyataan kebijakan mereka melalui satu format isian.
“Persyaratan 1.3 Kesadaran Nelayan akan Hak-Hak”	Direvisi	Persyaratan 1.3 direvisi secara keseluruhan. Sebagai ganti persyaratan bagi FIP untuk memastikan nelayan menyadari adanya Kode Etik Hak Asasi Manusia, persyaratan revisi mensyaratkan FIP untuk menyadari adanya pernyataan kebijakan FIP (lihat Persyaratan 1.1 yang direvisi) dan untuk memberikan informasi yang diperlukan melalui satu format isian.
“Lampiran A: Kode Etik Hak Asasi Manusia FisheryProgress”	Dihilangkan	Lampiran A dihilangkan dari kebijakan. Kode Etik Perilaku Hak Asasi Manusia FisheryProgress diubah menjadi satu model yang bisa digunakan FIP untuk memenuhi Persyaratan 1.1 (Direvisi).
“Lampiran B: Keselarasan Indikator-Indikator Alat SRA dengan Kode Etik Perilaku Hak Asasi Manusia”	Direvisi	Lampiran B direvisi untuk menghilangkan acuan ke Kode Etik Hak Asasi Manusia FisheryProgress.
“Lampiran D: Istilah Penting dan Definisi”	Konten baru	Istilah-istilah dan definisi-definisi baru dimasukkan dalam Lampiran D

Amandemen ini akan diintegrasikan sepenuhnya ke dalam versi 1.1 Kebijakan Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Sosial, yang dijadwalkan akan diluncurkan pada Kuartal ke-4 tahun 2022.

FisheryProgress sedang dalam proses memperbaharui [Pedoman Tinjauan Sosial FIP](#) untuk mencerminkan bagaimana persyaratan yang telah direvisi akan dievaluasi oleh para peninjau FisheryProgress. Pedoman yang diperbaharui akan diluncurkan pada Kuartal ke-2 tahun 2022. FIP-FIP sangat disarankan untuk meninjau pedoman tersebut secara rinci.

## Rincian Perubahan Kebijakan

### Perubahan umum

Perubahan-perubahan berikut ini berlaku untuk istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Sosial Versi 1.0:

- Semua acuan terkait persyaratan 1.1 dan 1.3 sekarang mengacu kepada persyaratan-persyaratan yang sudah direvisi yang dijelaskan dalam amandemen ini.
- Semua acuan tentang “Indikator-Indikator SRA yang selaras dengan Kode Etik Hak Asasi Manusia” dan “Indikator-Indikator Kode Etik” diganti dengan “Indikator-Indikator SRA FisheryProgress Utama”

## Gambaran Umum tentang Kebijakan (Direvisi)

Dua sub-bagian yaitu “Kapan FIP harus mematuhi kebijakan ini?” dan “Bagaimana FisheryProgress akan menangani tuduhan-tuduhan pelanggaran hak asasi manusia?”, dari bagian “Gambaran umum tentang kebijakan” direvisi. Semua sub-bagian lain tetap tidak berubah.

### Kapan FIP harus mematuhi kebijakan ini? (Direvisi)

Jadwal pelaksanaan bertahap diperbaharui untuk memberikan waktu tambahan bagi FIP untuk memahami dan memenuhi Persyaratan 1.1 dan 1.3 yang sudah direvisi. Jadwal pelaksanaan untuk persyaratan-persyaratan lain tetap tidak berubah.

Untuk memberi waktu pada FIP untuk meninjau dan mulai memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah direvisi, FisheryProgress membuat tahapan pemenuhan persyaratan-persyaratan dari waktu ke waktu, seperti yang diuraikan di bawah ini (Tabel 2).

**Perlu diingat bahwa meskipun Tabel 2 menunjukkan kapan persyaratan-persyaratan berlaku, jadwal-jadwal khusus yang berbeda yang harus dipenuhi FIP untuk memenuhi persyaratan yang disesuaikan dengan jadwal pelaporan mereka yang unik.** Ini dikarenakan pengiriman dokumen dan proses tinjauan merupakan bagian dari pelaporan rutin FIP setiap enam bulan sekali dan setiap setahun sekali. Selain itu, setiap persyaratan memuat rincian baik batas waktu awal dan batas waktu pelaporan, yang memastikan informasi selalu diperbaharui. Silahkan mengacu pada “[Panduan tentang Jadwal Pelaporan FIP](#)” untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

#### **Istilah Penting dan Definisi**

**FIP yang ada saat ini:** Semua FIP aktif, termasuk jenis FIP dasar dan FIP menyeluruh, yang melaporkan FisheryProgress sebelum tanggal berlakunya persyaratan Kebijakan Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Sosial terkait. Ini juga termasuk FIP yang telah mengirimkan profil untuk masuk dalam daftar sebagai FIP aktif sebelum tanggal berlakunya persyaratan kebijakan terkait.

**FIP baru:** Semua FIP, termasuk jenis FIP dasar dan FIP menyeluruh yang mengirimkan profil untuk masuk dalam daftar sebagai FIP aktif di FisheryProgress setelah tanggal berlakunya Kebijakan Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Sosial terkait.

**Laporan berikutnya:** Laporan pertama yang harus dikirimkan setelah tanggal berlakunya Kebijakan Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Sosial terkait. Ini bisa berupa laporan enam bulanan atau laporan tahunan, mana pun yang lebih dahulu.



**Table 2. Jadwal pelaksanaan bertahap (direvisi)**

Persyaratan Kebijakan	FIP yang Sudah Ada Saat Ini	FIP Baru
Mulai berlaku 1 November 2021 (saat ini sudah berlaku):		
<b>1.5 Evaluasi mandiri – tidak ada perubahan jadwal</b>	Laporan berikutnya	Untuk terdaftar sebagai FIP aktif
<b>2.1 Pengkajian risiko (jika disyaratkan)<sup>1</sup> - tidak ada perubahan jadwal</b>	12 bulan setelah pengiriman evaluasi mandiri (Persyaratan 1.5)	Laporan tahunan pertama
<b>2.2 Rencana kerja sosial (jika disyaratkan)<sup>2</sup> - tidak ada perubahan jadwal</b>	12 bulan setelah pengiriman evaluasi mandiri (Persyaratan 1.5)	Laporan tahunan pertama
Mulai berlaku 1 Mei 2022:		
<b>1.2 Daftar kapal - tidak ada perubahan jadwal</b>	Laporan berikutnya	Untuk terdaftar sebagai FIP aktif
<b>1.4 Mekanisme penyampaian keluhan - tidak ada perubahan jadwal</b>	Laporan berikutnya	Laporan enam bulanan pertama
Mulai berlaku 1 Jan 2023:		
<b>1.1 Pernyataan kebijakan (sebelumnya adalah Kode Etik) – jadwal direvisi</b>	Laporan berikutnya	Untuk terdaftar sebagai FIP aktif
<b>1.3 Kesadaran nelayan tentang hak-hak – jadwal direvisi</b>	Laporan berikutnya	Laporan enam bulanan pertama

**Bagaimana FisheryProgress akan menangani tuduhan-tuduhan pelanggaran hak-hak asasi manusia? (Dihilangkan)**

Subbagian ini dihilangkan seluruhnya. FisheryProgress akan menjelaskan pendekatannya dalam menangani tuduhan-tuduhan pelanggaran hak asasi manusia pada Kuartal ke-4 2022 (lihat Kata Pengantar untuk rincian tambahan).

<sup>1</sup> FIP yang memenuhi satu kriteria atau lebih tentang adanya risiko kerja paksa dan perdagangan manusia yang meningkat (lihat Persyaratan 1.5) harus menyelesaikan satu pengkajian risiko.

<sup>2</sup> FIP harus mengembangkan satu rencana kerja untuk mengatasi paling tidak semua indikator merah dalam pengkajian risiko.

## Persyaratan 1.1 (Direvisi): Menunjukkan adanya satu pernyataan kebijakan publik yang menjelaskan satu komitmen terhadap hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial

*Persyaratan 1.1 telah direvisi untuk meningkatkan rasa memiliki FIP terhadap komitmen hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial dan untuk mengurangi duplikasi untuk para peserta FIP yang telah mempunyai pernyataan kebijakan publik.*

### 1.1.1 Rincian persyaratan

FisheryProgress mengharapkan semua FIP yang melaporkan tentang FisheryProgress untuk menyampaikan komitmen kami untuk mengurangi risiko pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hak pekerja dalam FIP. FIP menunjukkan komitmen ini dengan memberikan satu pernyataan kebijakan publik (“Pernyataan Kebijakan”) yang menyatakan tanggung jawab, komitmen, dan/atau pengharapan mereka tentang hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial.

Untuk memenuhi persyaratan ini, FIP harus memberikan salinan dan/atau tautan satu Pernyataan Kebijakan atau lebih dan mengirimkan satu format isian Deskripsi Pernyataan Kebijakan FisheryProgress yang sudah diisi untuk setiap Pernyataan Kebijakan.

#### **Istilah Penting dan Definisi**

**Peserta FIP:** Entitas apa pun yang berpartisipasi aktif dalam satu FIP dengan memberikan kontribusi finansial atau natura untuk proyek dan/atau menjalankan aktivitas-aktivitas dalam rencana kerja. FIP diwajibkan untuk melibatkan partisipasi aktif perusahaan-perusahaan dalam rantai pasok. Peserta penting lainnya meliputi pemerintah, pengelola perikanan, dan lembaga swadaya non-pemerintah (LSM). (Sumber: [Pedoman untuk Mendukung Proyek Peningkatan Perikanan](#), Conservation Alliance for Seafood Solutions, 2021)

**Peserta rantai pasok FIP:** Para peserta FIP yang membeli atau menjual produk-produk FIP. Ini termasuk perusahaan maupun para wakil mereka.

**Pernyataan kebijakan:** Satu perjanjian yang didokumentasikan yang digunakan satu FIP dan/atau para pesertanya untuk secara terbuka mengungkapkan tanggung jawab, komitmen, dan/atau pengharapan paling tidak tentang hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial. Pernyataan kebijakan bisa dalam bentuk pedoman perilaku, komitmen, kebijakan, panduan, standar, atau dokumen lain.

Pernyataan Kebijakan harus memenuhi kriteria berikut ini:

1.1.1a Berlaku untuk semua kapal dan nelayan yang melakukan penangkapan ikan, baik di tepi laut atau di atas kapal, dan mengangkut tangkapan produk FIP.

1.1.1b Menangani kategori-kategori berikut (yang berkaitan dengan indikator-indikator SRA), yang berlaku untuk kapal dan nelayan dalam FIP<sup>3</sup>:

- Penganiayaan dan pelecehan (SRA1.1.1)
- Perdagangan manusia dan tenaga kerja paksa (SRA1.1.2a)

<sup>3</sup> Kategori-kategori ini (yang selaras dengan identifikasi-indikator SRA) dirancang untuk mencakup berbagai perikanan dan konteks. Ini artinya tidak semua kategori berlaku untuk semua FIP. Untuk panduan tambahan tentang menentukan kategori mana yang berlaku, silahkan mengacu pada tabel Panduan Penentuan Skor di [Alat Pengkajian Tanggung Jawab Sosial untuk Sektor Makanan Laut](#).

- Ikatan hutang (SRA1.1.2b)
- Tenaga kerja anak (SRA1.1.3)
- Kebebasan berasosiasi dan melakukan perundingan kolektif (SRA1.1.4)
- Penghasilan dan tunjangan (SRA1.1.5)
- Istirahat yang cukup (SRA1.1.6)
- Akses ke layanan dasar untuk penginapan pekerja/tempat tinggal di atas kapal (SRA1.1.7a)
- Keselamatan kerja (SRA1.1.8)
- Bantuan medis (SRA1.1.9)
- Pelaporan pengaduan keluhan dan akses pemulihan (SRA2.1.1)
- Diskriminasi (SRA2.2.2)

1.1.1c Disetujui oleh pihak atau pihak-pihak terkait dalam FIP. Minimal ini artinya satu atau lebih dari satu dari berikut ini:

- Ketua FIP<sup>4</sup> menandatangani satu Pernyataan Kebijakan atas nama para peserta rantai pasok FIP.
- Masing-masing peserta rantai pasok FIP menandatangani satu Pernyataan Kebijakan.
- Masing-masing peserta rantai pasok FIP mempunyai satu Pernyataan Kebijakan yang dimuat di situs web perusahaan mereka.

1.1.1d Aktif selama FIP aktif di FisheryProgress.

1.1.1e Dibagikan kepada semua peserta FIP dalam bahasa yang mereka pahami.

Format isian Deskripsi Pernyataan Kebijakan FisheryProgress memberikan informasi berikut ini untuk setiap Pernyataan Kebijakan:

- Deskripsi tentang kebijakan, prosedur, praktik, dan sistem yang ada untuk memastikan dipenuhinya dan dipertahankannya tanggung jawab, komitmen, dan/atau pengharapan yang diuraikan di dalam Pernyataan Kebijakan.
- Deskripsi tentang bagaimana Pernyataan Kebijakan memenuhi kriteria di atas, termasuk
  - Untuk 1.1.1a, keberlakuan setiap Pernyataan Kebijakan
  - Untuk 1.1.1b, kategori-kategori (yang berkaitan dengan masing-masing indikator SRA) yang dipenuhi oleh Pernyataan Kebijakan
  - Untuk 1.1.1c, pihak atau para pihak di dalam FIP yang menyetujui setiap Pernyataan Kebijakan
  - Untuk 1.1.1d, tanggal mulai berlaku dan, jika sesuai, tanggal berakhirnya Pernyataan Kebijakan
  - Untuk 1.1.1e, konfirmasi bahwa Pernyataan Kebijakan telah dibagikan kepada semua peserta FIP dalam bahasa yang mereka pahami

---

<sup>4</sup> Jika satu FIP mempunyai lebih dari satu ketua FIP, hanya satu ketua FIP yang harus menandatangani.

### **Praktik Unggulan**

Model FIP didasarkan pada gagasan bahwa berbagai pemangku kepentingan harus saling mendukung untuk meningkatkan kinerja dan untuk memantau serta menegakkan perubahan perilaku dalam rantai pasok. Untuk menunjukkan bahwa rasa untuk melakukan tindakan bersama dan mengemban tanggung jawab bersama tidak hanya berlaku untuk keberlanjutan lingkungan namun juga keberlanjutan sosial, **FisheryProgress sangat mendorong semua peserta FIP untuk berkomitmen pada pernyataan kebijakan tunggal secara kolektif.** Tindakan-tindakan yang dilakukan untuk memegang teguh pernyataan kebijakan tersebut bisa berbeda-beda untuk berbagai jenis peserta dan pemangku kepentingan FIP yang berbeda. Misalnya:

- Peserta ritel/pemilik merek bisa membuat, mengkomunikasikan, dan memenuhi ekpektasi, serta memberikan bantuan finansial dan/atau teknis kepada para produsen.
- Peserta dari perusahaan pengolahan bisa menegakkan komitmen dan ekspektasi melalui keputusan-keputusan mereka terkait pembelian.
- Peserta produsen bisa meningkatkan pengelolaan, kebijakan, dan prosedur perusahaan mereka dan melibatkan para wakil pekerja.
- Organisasi dagang dan industri bisa menentukan sasaran dan meningkatkan akuntabilitas perusahaan-perusahaan yang menjadi anggotanya.
- Para peserta dari LSM konservasi bisa mengoptimalkan wawasan mereka untuk memberi penekanan pada potensi-potensi risiko dan memastikan mereka menggunakan pendekatan yang tidak menimbulkan kerugian (“*do no harm*”) dalam kerja mereka.
- Para peserta dari LSM yang bergerak dalam hak-hak sosial-ekonomi, hak buruh, dan hak asasi manusia bisa memberikan keahlian mereka dalam pengkajian risiko dan merancang perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan konteks setempat.
- Peserta akademisi bisa bekerja untuk memahami dan mengidentifikasi praktik-praktik unggulan untuk meredam risiko.
- Semua peserta FIP bisa melobi RFMOs, dan EEZ serta negara asal kapal untuk bisa meningkatkan kerangka kerja hukum, peraturan dan pelaksanaan agar memenuhi standar-standar internasional.
- Peserta pemerintah bisa mengidentifikasi kesenjangan hukum, peraturan, dan pelaksanaan dan bekerja untuk mengatasi kesenjangan tersebut.

FIP yang berharap untuk mengadopsi pendekatan ini didorong untuk menggunakan model pernyataan kebijakan FisheryProgress untuk memenuhi Persyaratan 1.1. Model ini bisa dilihat di FisheryProgress dalam [“Format Isian FIP.”](#)

### **Batas Waktu Awal<sup>5</sup>**

FIP harus memenuhi persyaratan ini untuk terdaftar sebagai FIP yang aktif di FisheryProgress.

FIP yang tidak mampu memenuhi batas waktu awal ini bisa meminta perpanjangan hingga enam bulan. Untuk meminta perpanjangan ini, FIP harus melengkapi dan mengirimkan format isian Deskripsi Pernyataan Kebijakan FisheryProgress dan menguraikan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan untuk bisa memenuhi persyaratan sepenuhnya di akhir masa perpanjangan yang diminta.

---

<sup>5</sup> Lihat di atas, Gambaran Umum tentang Kebijakan, untuk rincian tentang kapan persyaratan ini dan persyaratan-persyaratan lain mulai berlaku.

## **Batas Waktu Pelaporan Kemajuan**

FIP harus terus memenuhi persyaratan ini selama FIP aktif di FisheryProgress. FIP harus menyatakan kembali dalam laporan tahunan mereka bahwa informasi yang diberikan tetap berlaku dan memenuhi rincian-rincian persyaratan di atas. Segala perubahan terhadap FIP, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan pada ketua FIP dan/atau peserta FIP, harus ditunjukkan dalam Pernyataan Kebijakan yang diperbaharui dan dalam format isian Dekripsi Pernyataan Kebijakan FisheryProgress.

### **1.1.2 Latar belakang pemikiran dan informasi tambahan**

Memberikan satu pernyataan kebijakan publik merupakan satu cara efektif untuk menyampaikan kepada para nelayan dan para pemangku kepentingan lainnya tentang bagaimana FIP memprioritaskan dan menangani hak-hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial. Ini merupakan satu hal mendasar dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia yang meningkatkan akuntabilitas internal maupun eksternal.

FIP ada dalam berbagai bentuk dan ukuran. Persyaratan ini dirancang untuk mengakomodasi keragaman tersebut dengan memungkinkan para ketua dan peserta FIP untuk menentukan model terbaik untuk menyampaikan komitmen mereka terhadap hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial. Sebagian FIP mungkin memilih untuk memenuhi persyaratan ini dengan membuat satu pernyataan kebijakan tunggal seperti yang diuraikan di dalam boks Praktik Unggulan di atas. FIP lain mungkin memilih untuk memenuhi persyaratan ini dengan berbagi tentang kode etik yang sudah disetujui peserta rantai pasok mereka. Mengizinkan FIP untuk menyusun sendiri rancangan pernyataan kebijakan mereka bisa meningkatkan rasa memiliki dan akuntabilitas dan memberikan keluwesan untuk memastikan pendekatan mereka mencerminkan konteks-konteks mereka yang khas.

Tanpa memandang siapa yang menyetujui pernyataan kebijakan, semua peserta FIP mempunyai tanggung jawab moral dan legal untuk memastikan hak-hak asasi manusia dijunjung tinggi.

#### **Praktik Unggulan**

FIP sangat disarankan untuk melakukan konsultasi dengan semua pemangku kepentingan terkait, khususnya dan yang penting dengan para nelayan serta wakil mereka ketika menyusun pernyataan-pernyataan kebijakan mereka. Setelah pernyataan kebijakan selesai disusun, penting untuk secara efektif menyampaikan ekspektasi-ekspektasi kepada semua pihak terkait. Misalnya, pernyataan kebijakan bisa dan sebaiknya menjadi bagian dari kontrak kemitraan, pendanaan, dan pembelian antara para peserta FIP dengan mitra-mitra rantai pasok mereka, termasuk Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh peserta FIP.

### **Persyaratan 1.3 (Direvisi) Melaksanakan upaya terbaik untuk membuat para nelayan sadar terhadap hak-hak mereka.**

*Persyaratan 1.3 direvisi untuk bisa mengacu langsung ke Persyaratan 1.1 dan perubahan-perubahan terhadap persyaratan tersebut. Sebagai pengganti syarat bagi FIP untuk membuat para nelayan sadar akan Kode Etik Hak Asasi Manusia FisheryProgress, persyaratan yang*

*direvisi mensyaratkan FIP untuk membuat para nelayan menyadari adanya pernyataan kebijakan FIP (lihat revisi Persyaratan 1.1).*

### 1.3.1 Rincian persyaratan

FIP harus melakukan upaya-upaya terbaik untuk membuat para nelayan sadar akan hak-hak mereka, paling tidak tentang:

- Komitmen dan tanggung jawab yang diuraikan dalam pernyataan kebijakan FIP (lihat Persyaratan 1.1).
- Adanya mekanisme penyampaian keluhan dan bagaimana menggunakannya

FIP harus memastikan tersedianya informasi yang selalu diperbaharui untuk para nelayan selama FIP aktif di FisheryProgress.

Untuk memenuhi persyaratan ini, FIP harus mengirimkan satu format isian Kesadaran Nelayan FisheryProgress akan Hak-Hak dan memberikan bukti untuk mendukung aksi-aksi yang diuraikan di dalam format isian tersebut.

Format isian Kesadaran Nelayan FisheryProgress akan Hak-Hak berisi informasi berikut ini:

- Daftar tindakan-tindakan yang harus dilakukan, termasuk perkiraan jadwalnya.
- Daftar bukti untuk mendukung tindakan-tindakan tersebut.
- Konfirmasi bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan dirancang untuk menjangkau semua nelayan yang terlibat dalam penangkapan produk FIP.
- Konfirmasi bahwa tindakan-tindakan tersebut dilakukan dengan bahasa yang dipahami oleh para nelayan dan dilakukan penyesuaian untuk nelayan yang buta huruf.

#### **Praktik Unggulan**

Ada beragam pendekatan yang efektif untuk membuat nelayan menyadari hak-hak mereka, termasuk namun tidak terbatas pada: menempelkan pemberitahuan di kapal dan di dermaga, memberikan pelatihan, dan/atau menyertakan informasi tentang pernyataan kebijakan FIP dan mekanisme penyampaian keluhan dalam dokumen-dokumen perekrutan seperti kontrak anak buah kapal dan manual pegawai. Serikat pekerja nelayan dan para wakil pekerja lainnya berada dalam posisi yang paling tepat untuk membantu FIP dan para pesertanya untuk memberdayakan nelayan secara bermakna untuk melaporkan segala pelanggaran terhadap hak-hak mereka melalui mekanisme-mekanisme pengaduan.

Menyadarkan para nelayan tentang hak-hak mereka bukanlah tanggung jawab satu pemangku kepentingan saja. Sebaliknya, ini merupakan upaya kolektif dalam komunikasi efektif yang didukung oleh penyampaian pesan secara rutin dari berbagai sumber.

#### **Batas Waktu Awal<sup>6</sup>**

FIP harus memenuhi Persyaratan ini dalam laporan enam bulanan pertama mereka setelah terdaftar sebagai FIP aktif di FisheryProgress.

---

<sup>6</sup> Lihat di atas, Gambaran Umum tentang Kebijakan, untuk mendapatkan rincian tentang kapan persyaratan ini dan persyaratan-persyaratan lain mulai diberlakukan.

FIP yang mendapatkan perpanjangan untuk Persyaratan 1.1 dan/atau Persyaratan 1.3 bisa meminta perpanjangan (untuk persyaratan ini) yang tidak boleh melebihi masa perpanjangan yang diberikan untuk Persyaratan 1.1 dan/atau Persyaratan 1.3. Untuk mengajukan permintaan perpanjangan, FIP harus mengisi dan mengirimkan format isian Kesadaran Nelayan FisheryProgress akan Hak-Hak dan menguraikan aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan FIP untuk bisa memenuhi persyaratan tersebut sepenuhnya di akhir masa perpanjangan yang diminta.

### **Batas Waktu Pelaporan Kemajuan**

FIP harus memberikan informasi terbaru tentang upaya-upaya yang terus mereka lakukan untuk membuat para nelayan sadar akan hak-hak mereka sebagai bagian dari laporan tahunan mereka, yang dimulai dengan laporan tahunan pertama mereka setelah masuk daftar sebagai FIP aktif di FisheryProgress.

### **1.3.2 Latar belakang pemikiran dan informasi tambahan**

Membuat para nelayan menyadari hak-hak mereka penting dalam memastikan adanya lingkungan kerja yang aman dan sehat dan bahwa hak-hak asasi manusia dijunjung tinggi di tempat kerja. Angkatan kerja yang penuh wawasan dan berdaya bisa menjadi pemantau tempat kerja yang kuat yang mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul. Keterlibatan nelayan seperti ini merupakan bagian penting dari proses-proses uji tuntas hak asasi manusia.

FIP sangat didorong untuk bekerja dengan lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi buruh dan hak asasi manusia setempat, dan para wakil pekerja (jika ada) untuk memenuhi persyaratan ini. Lembaga-lembaga ini mempunyai posisi yang paling tepat untuk membantu para peserta FIP untuk memahami bagaimana menyampaikan tentang hak kepada para nelayan dengan cara yang memberdayakan untuk melibatkan mereka dengan manajemen agar kondisi kerja terus meningkat.

## Lampiran A (Dihilangkan)

*Kebijakan ini tidak lagi mensyaratkan FIP untuk menandatangani Kode Etik Hak Asasi Manusia FisheryProgress sehingga Lampiran A dihilangkan dari kebijakan ini seluruhnya. FisheryProgress sedang menyusun kembali Kode Etik Hak Asasi Manusia FisheryProgress tersebut menjadi satu model yang bisa digunakan untuk memenuhi Persyaratan 1.1 (Direvisi). Model tersebut dan panduan yang menyertainya akan diluncurkan pada Kuartal ke-2 tahun 2022 dan setelah itu bisa diakses di FisheryProgress dalam [“Format Isian FIP.”](#)*



## Lampiran B (Direvisi) Indikator-Indikator SRA FisheryProgress yang Utama

Lampiran B direvisi untuk mencerminkan perubahan-perubahan pada Persyaratan 1.1.

Tabel di bawah ini (Tabel 3) berisi keseluruhan indikator kinerja (IK) SRA. **IK yang diberi warna biru dan ditandai dengan bintang (\*) merupakan Indikator-Indikator SRA FisheryProgress yang Utama.** Ini merupakan indikator-indikator yang:

- Perlu dikaji (sesuai keperluan<sup>7</sup>) untuk FIP yang memenuhi satu kriteria atau lebih adanya risiko kerja paksa dan perdagangan manusia yang meningkat (lihat Persyaratan 1.5 dan 2.1).
- Harus dikaji oleh perorangan atau tim yang mempunyai kualifikasi yang diuraikan dalam Lampiran C Kebijakan Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Sosial FisheryProgress, tanpa memandang apakah FIP diwajibkan untuk melakukan pengkajian tersebut atau melakukannya secara suka rela (lihat Persyaratan 2.1 dan 3.1).

**Tabel 3: Indikator-Indikator Kinerja SRA**

Komponen	Indikator Kinerja (IK)	
<b>Prinsip 1: Melindungi hak asasi manusia, martabat, dan akses ke sumber daya</b>		
1.1 Hak asasi manusia dan hak tenaga kerja	1.1.1*	Penganiayaan and pelecehan
	1.1.2a*	Perdagangan manusia dan tenaga kerja paksa
	1.1.2b*	Ikatan hutang pada nelayan kecil
	1.1.3*	Tenaga kerja anak
	1.1.4*	Kebebasan berasosiasi dan melakukan perundingan kolektif
	1.1.5*	Penghasilan dan tunjangan
	1.1.6*	Istirahat yang cukup
	1.1.7a*	Akses ke layanan dasar untuk penginapan pekerja/tempat tinggal di atas kapal
	1.1.7b	Akses ke layanan dasar untuk komunitas nelayan skala kecil
	1.1.8*	Keselamatan kerja
1.1.9*	Bantuan medis	
1.2 Hak Akses	1.2.1*	Hak penggunaan sumber daya masyarakat adat
	1.2.2	Tanggung jawab perusahaan dan transparansi
<b>Prinsip 2: Menjamin kesetaraan dan kesempatan yang adil untuk memperoleh manfaat</b>		

<sup>7</sup> SRA dirancang untuk bisa mencakup berbagai perikanan dan konteks dan menyediakan serangkaian IK yang menyeluruh untuk itu. Ini artinya tidak semua IK berlaku untuk semua FIP. Untuk panduan tambahan tentang cara menentukan IK mana yang berlaku, silahkan mengacu pada tabel Panduan Penentuan Skor di [Alat Pengkajian Tanggung Jawab Sosial untuk Sektor Makanan Laut](#).

2.1 Kesetaraan	<b>2.1.1*</b>	<b>Laporan pengaduan keluhan dan akses pemulihan</b>
	2.1.2	Partisipasi pemangku kepentingan dan manajemen kolaboratif
2.2 Keadilan	2.2.1	Kesempatan yang adil untuk mendapatkan layanan
	<b>2.2.2*</b>	<b>Diskriminasi</b>
<b>Prinsip 3: Meningkatkan ketahanan pangan, gizi, dan penghidupan</b>		
3.1 Ketahanan pangan dan gizi	3.1.1a	Dampak perikanan industri pada ketahanan pangan dan gizi
	3.1.1b	Ketahanan pangan dan gizi untuk komunitas nelayan skala kecil
	3.1.2	Perawatan kesehatan
	3.1.3	Pendidikan
3.2 Ketahanan penghidupan	3.2.1	Layanan bagi dan dalam komunitas
	3.2.2	Retensi nilai ekonomi
	3.2.3	Profitabilitas jangka panjang dan tenaga kerja masa depan
	3.2.4	Fleksibilitas dan otonomi ekonomi
	3.2.5	Ketahanan penghidupan
	3.2.6	Efisiensi sumber bahan bakar

## Lampiran D (Direvisi) Istilah Penting dan Definisi

*Istilah-istilah dan definisi-definisi baru di bawah ini mendukung perubahan-perubahan yang dijelaskan dalam amandemen ini. Semua istilah dan definisi yang ada dalam Lampiran D tetap tidak berubah.*

Istilah-istilah dan definisi-definisi di bawah ini dimasukkan dalam [Daftar Istilah FisheryProgress](#). Semuanya merupakan konsep-konsep kunci yang membantu pembaca untuk memahami kebijakan ini dan bahan-bahan terkait.

### **FIP yang Ada Saat Ini**

Semua FIP aktif, baik jenis FIP dasar dan FIP menyeluruh, yang melaporkan FisheryProgress sebelum tanggal berlakunya persyaratan Kebijakan Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Sosial terkait. Ini juga termasuk FIP yang telah mengirimkan profil untuk masuk dalam daftar sebagai FIP aktif sebelum tanggal berlakunya persyaratan kebijakan terkait.

### **Peserta rantai pasok FIP**

Para peserta FIP yang membeli atau menjual produk FIP. Ini termasuk baik perusahaan dan para wakil mereka.

### **FIP Baru**

Semua FIP, baik jenis FIP dasar dan FIP menyeluruh yang mengirimkan profil untuk masuk dalam daftar sebagai FIP aktif di FisheryProgress setelah tanggal berlakunya Kebijakan Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Sosial terkait.

### **Laporan berikutnya**

Laporan pertama yang harus dikirimkan setelah tanggal berlakunya persyaratan kebijakan terkait. Ini bisa berupa laporan enam bulanan atau laporan tahunan, mana pun yang lebih dahulu.

### **Pernyataan kebijakan**

Satu perjanjian yang didokumentasikan yang digunakan satu FIP dan/atau para pesertanya untuk secara terbuka mengungkapkan tanggung jawab, komitmen, dan/atau pengharapan paling tidak tentang hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial. Pernyataan kebijakan bisa dalam bentuk pedoman perilaku, komitmen, kebijakan, panduan, standar, atau dokumen lain.